

No Katalog : 9302021.1212

**Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Deli Serdang
Menurut Pengeluaran
2016-2020**



<https://deliserdangkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang

**Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Deli Serdang
Menurut Pengeluaran**

2016-2020



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

ISSN : 2776-0669
Nomor Publikasi : 12120.2103
Katalog BPS : 9302021.1212

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 82 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Dicetak Oleh:

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab Umum** : Ir. Sawaluddin Naibaho, M.Si
- Penyunting** : Lucia Erna Widyastuti, SST, M.Si
- Penulis** : Melati Simanjuntak, S.Si
- Pengolah Data** : Lucia Erna Widyastuti, SST, M.Si
Melati Simanjuntak, S.Si
- Gambar Kulit** : Melati Simanjuntak, S.Si

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang telah dapat menyelesaikan publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang 2016-2020”.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Netto Ekspor Barang dan Jasa. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Publikasi ini menyajikan gambaran perekonomian yang dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2020, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, disajikan dalam bentuk penjelasan tentang konsep dan definisi serta penjelasan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran.

Disadari bahwa dalam publikasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pemakai data untuk perbaikan serta penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Lubuk Pakam, April 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang

Ir. Sawaluddin Naibaho, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	7
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT).....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	23
2.5 Perubahan Inventori (PI).....	26
2.6 Netto Ekspor Barang dan Jasa.....	30
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT PDRB PENGELUARAN, 2016 - 2020.....	33
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	35
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	45
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	46
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT.....	50
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah.....	51
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	55
3.2.5 Perubahan Inventori.....	57

3.2.6	Netto Ekspor Barang dan Jasa	58
IV.	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016- 2020	61
4.1	PDRB (Nominal)	63
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	64
V.	PENUTUP.....	67

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	37
Grafik 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	39
Grafik 3.3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	39
Grafik 3.4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (<i>persen</i>)	41
Grafik 3.5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	12
Tabel 3. 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Miliar Rp).....	36
Tabel 3. 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Miliar Rp).....	38
Tabel 3. 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Persen)	40
Tabel 3. 4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Persen).....	42
Tabel 3. 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020.....	44
Tabel 3. 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Persen).....	45
Tabel 3. 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	47
Tabel 3. 8	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)	48
Tabel 3. 9	Pertumbuhan Implisist (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen).....	50
Tabel 3. 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	51
Tabel 3. 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020.....	53
Tabel 3. 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	56

Tabel 3. 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020.....	57
Tabel 3. 14	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020.....	59
Tabel 4. 1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020	63
Tabel 4. 2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020.....	64

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Juta Rupiah).....	73
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (Juta Rupiah).....	74
Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen).....	75
Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen).....	76
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen).....	77
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)	78
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)	79
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)	80
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2010=100 Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen).....	81
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2010=100 Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020(persen).....	82

BAB 1

PENDAHULUAN



**PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut
Pengeluaran (Miliar Rupiah)**

110.145,24

<https://delisei.kab.bps.go.id>

**PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut
Pengeluaran (Miliar Rupiah)**

70.596,82



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (*Income*) = PDRB Produksi

C (*Consumption*) = Konsumsi akhir

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Tabel 1.1. Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



**Laju Pertumbuhan PDRB ADHB menurut
Pengeluaran (Persen)
0,74**

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut
Pengeluaran (Persen)
(1,78)**



2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

I. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

II. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

III. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

IV. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

V. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

I. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

II. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

III. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT

dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

IV. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

V. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

13. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
14. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
15. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
16. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);

17. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
18. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

I. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

II. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

III. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

IV. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

V. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output - Penjualan barang dan jasa +
Social transfer in kind purchased market production +
Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

I. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

II. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

III. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

IV. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

V. Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ *Metoda Langsung:*

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik +
TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM
+Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ *Metoda Tidak Langsung:*

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

I. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

II. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

III. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

IV. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;

6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjen Kementan.

V. Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\begin{aligned} \text{PI atas dasar harga Konstan} = & \text{Inventori (t) atas dasar harga} \\ & \text{Berlaku/IHPB (t)} - \\ & \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)} \end{aligned}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6. NETTO EKSPOR BARANG DAN JASA

I. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

II. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

III. Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota

b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

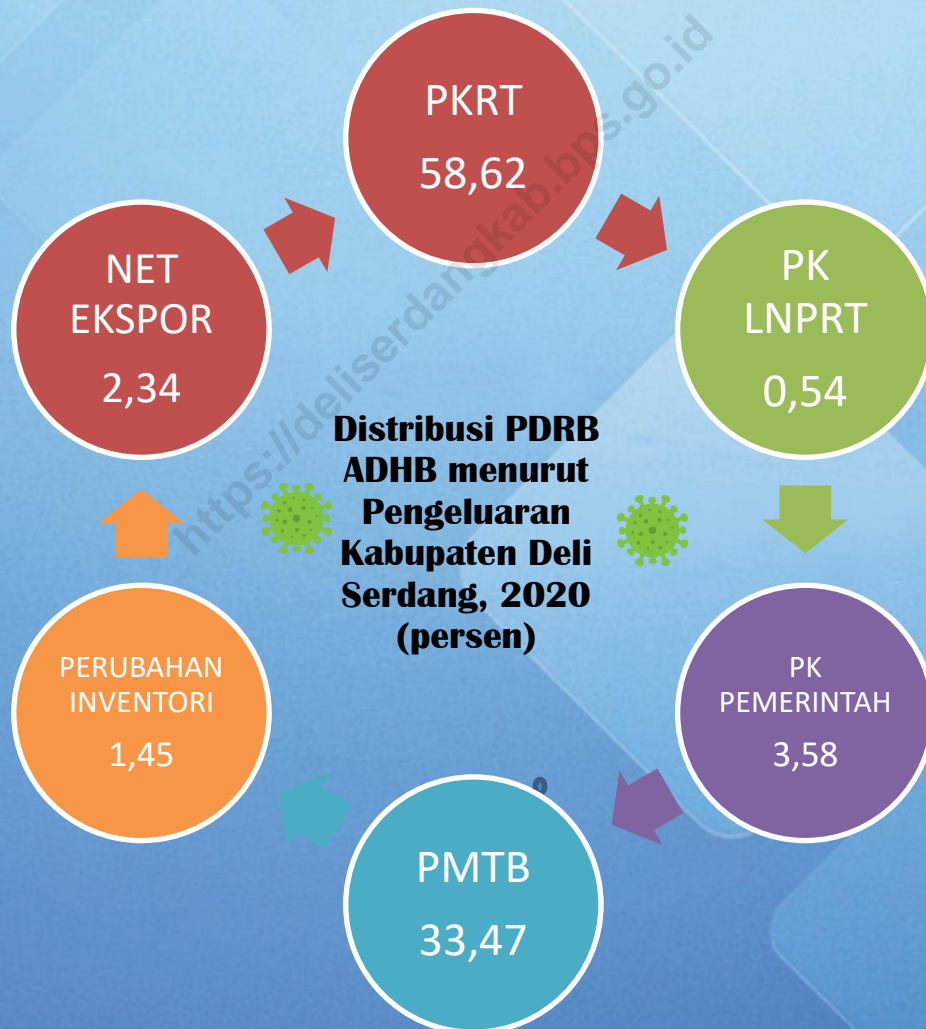
IV. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha.

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT PDRB PENGELUARAN



3. 1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Deli Serdang atas dasar harga berlaku di tahun 2020 meningkat sebesar 0,74 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni dari 109,33 triliun rupiah menjadi 110,14 triliun rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, mengalami penurunan yakni dari 71,88 triliun rupiah menjadi 70,60 triliun rupiah (2010=100), atau menurun sebesar (1,78) persen.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Sumatera Utara yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Deli Serdang periode 2016 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni berturut-turut sebesar 5,32 persen; 5,10 persen; 5,15 persen dan 5,18 persen. Namun di tahun 2020 perekonomian melemah secara global sebagai dampak dari pandemi covid-19. Penurunan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan yang turun mencapai (12,10) persen di tahun 2020. Sedangkan dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang paling rendah adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga yang mencapai (0,94) persen.

Pada periode tahun 2016 - 2019 PDRB Kabupaten Deli Serdang atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 85,15 triliun rupiah

(2016); 93,19 triliun rupiah (2017); 101,06 triliun rupiah (2018) dan 109,33 triliun rupiah (2019). Sementara di tahun 2020 sebesar 110,14 triliun rupiah, menunjukkan peningkatan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Deli Serdang pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 3.1 dan grafik 3.1 berikut ini:

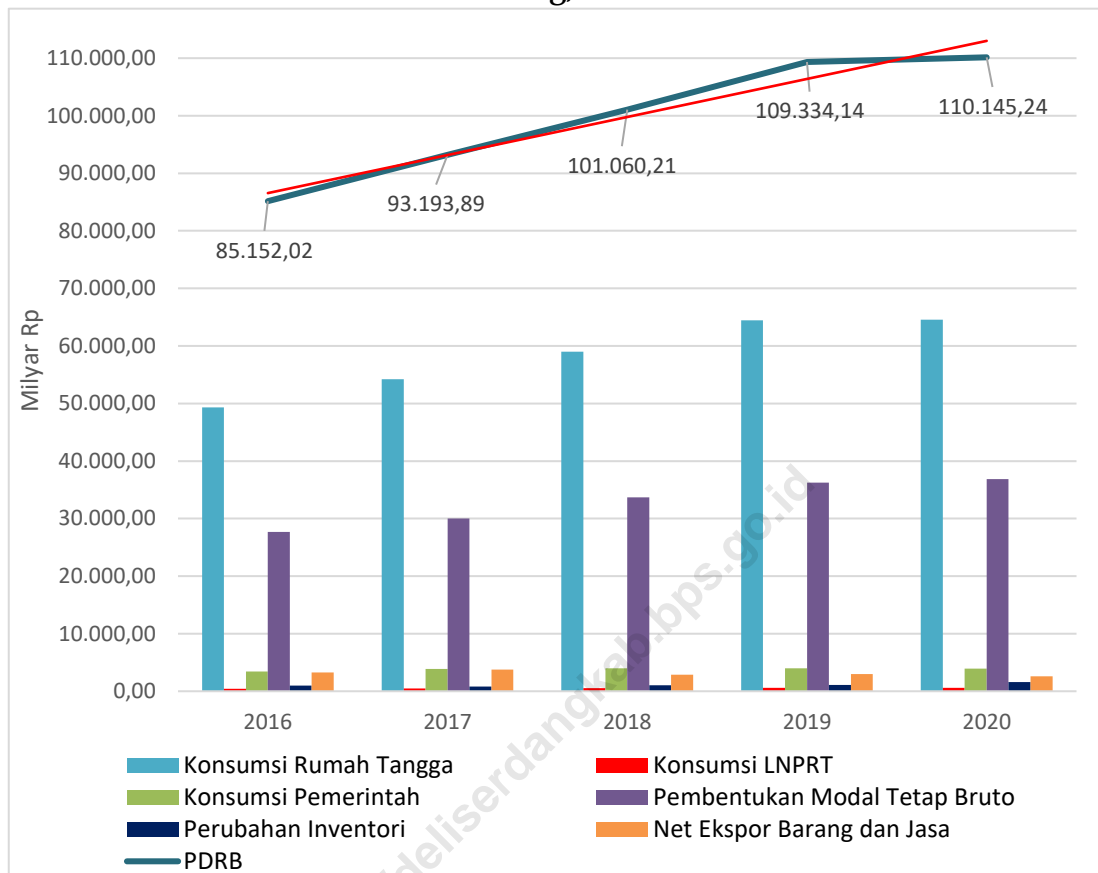
Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	49 311,12	54 188,32	58 987,65	64 449,02	64 572,22
2. Konsumsi LNPRT	453,23	485,38	529,02	588,18	594,01
3. Konsumsi Pemerintah	3 453,98	3 879,70	3 971,08	3 980,84	3 942,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27 689,03	30 037,38	33 665,18	36 270,89	36 862,78
5. Perubahan Inventori	994,34	826,47	1 052,50	1 084,48	1 598,81
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	3 250,31	3 776,65	2 854,79	2 960,74	2 574,61
PDRB	85 152,02	93 193,89	101 060,21	109 334,14	110 145,24

*)Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Grafik 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Deli Serdang pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 3.2 dan grafik 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Deli Serdang 2016 – 2020, (Miliar Rp)**

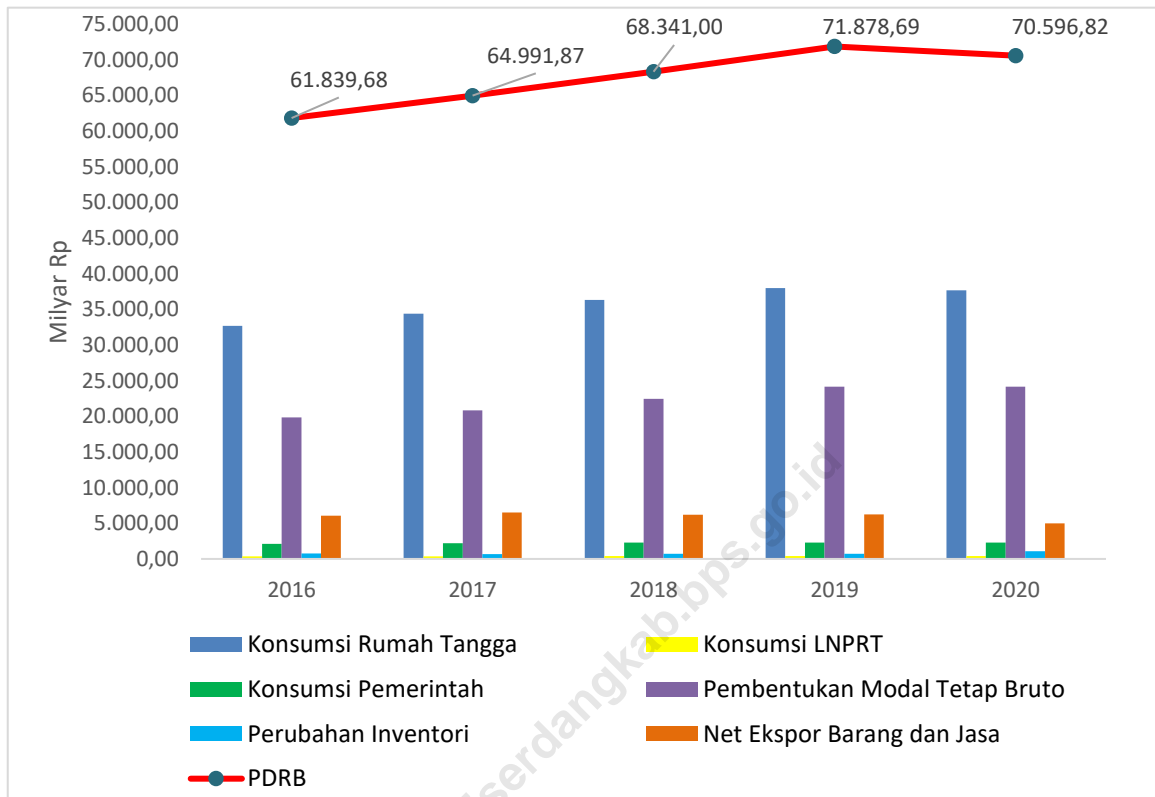
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	32 679,99	34 394,75	36 320,61	37 987,08	37 678,98
2. Konsumsi LNPRT	352,82	362,66	385,92	422,22	418,25
3. Konsumsi Pemerintah	2 120,47	2 224,23	2 291,42	2 298,10	2 288,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19 851,90	20 839,36	22 436,78	24 161,12	24 156,37
5. Perubahan Inventori	766,46	660,45	724,87	715,93	1 063,00
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	6 068,04	6 510,42	6 181,41	6 264,23	4 992,12
PDRB	61 839,68	64 991,87	68 341,00	71 878,69	70 596,82

*) Angka sementara

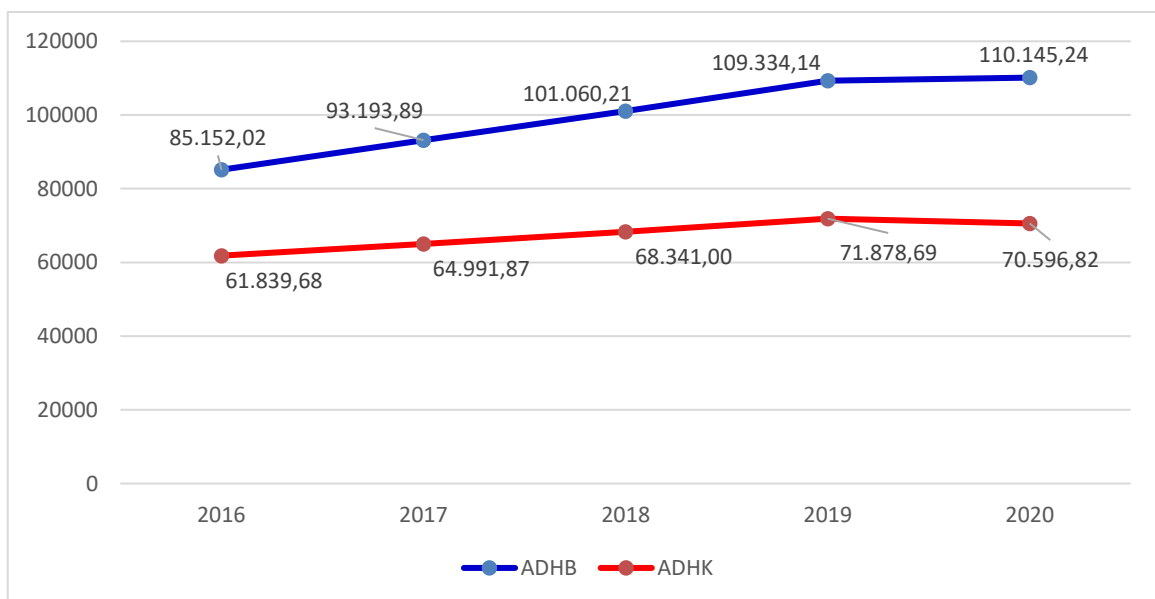
**) Angka sangat sementara

Dari tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Deli Serdang meningkat, yakni sebesar 61,84 triliun rupiah (2016), 64,99 triliun rupiah (2017); 68,34 triliun rupiah (2018) dan 71,88 triliun rupiah di tahun 2019. Tahun 2020 menurun menjadi 70,60 triliun rupiah, hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi covid - 19. Sedangkan dari grafik 3.2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Grafik 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020



Grafik 3.3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016-2020 (milyar rupiah)



Dari grafik 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	57,91	58,15	58,37	58,95	58,62
2. Konsumsi LNPRT	0,53	0,52	0,52	0,54	0,54
3. Konsumsi Pemerintah	4,06	4,16	3,93	3,64	3,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,52	32,23	33,31	33,17	33,47
5. Perubahan Inventori	1,17	0,89	1,04	0,99	1,45
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	3,82	4,05	2,82	2,71	2,34
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

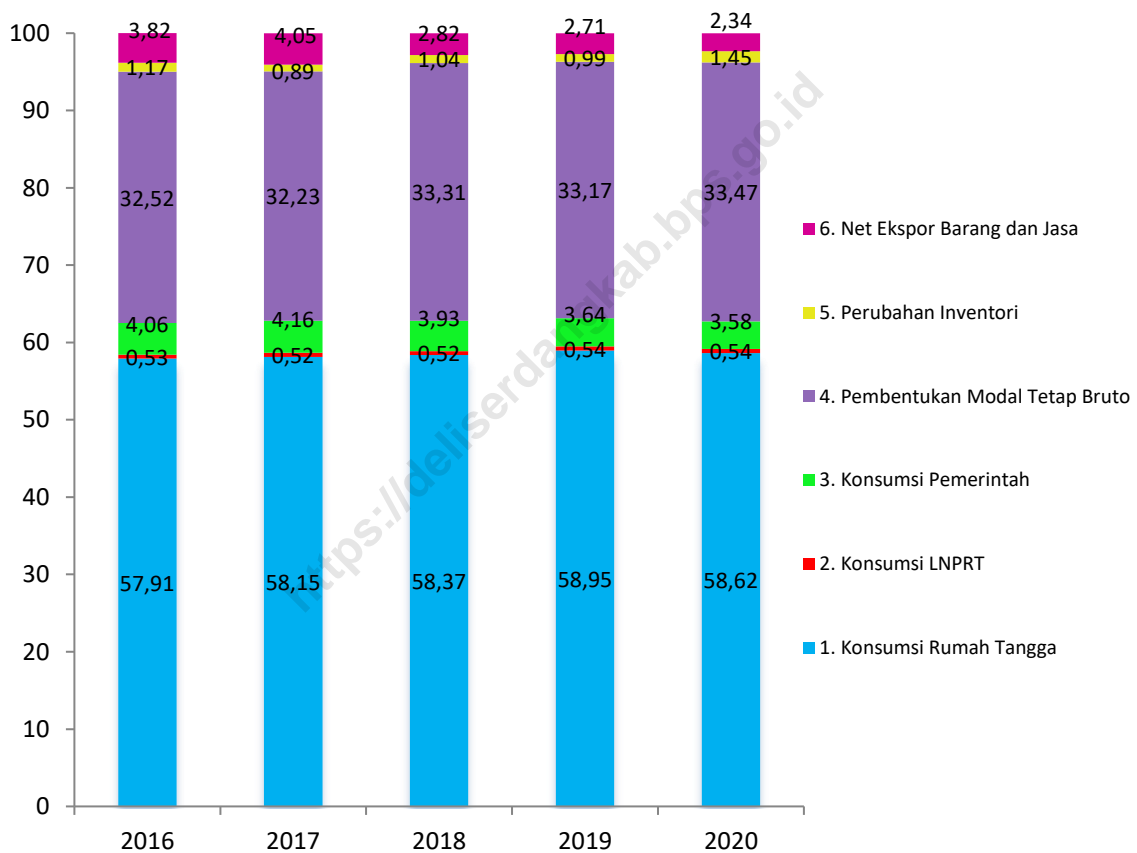
*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2016 – 2020, PDRB Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) sekitar 57,91 s.d 58,91 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 32,52 s.d 33,47 persen.

Grafik 3.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 3,58 – 4,16 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator

ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 3.4, selama periode tahun 2016 - 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuatif, yakni sebesar 5,32 persen (2016); 5,10 persen (2017); 5,15 persen (2018); 5,18 persen (2019) dan yang paling rendah di tahun 2020 sebesar (1,78) persen. Sedangkan dari grafik 3.5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

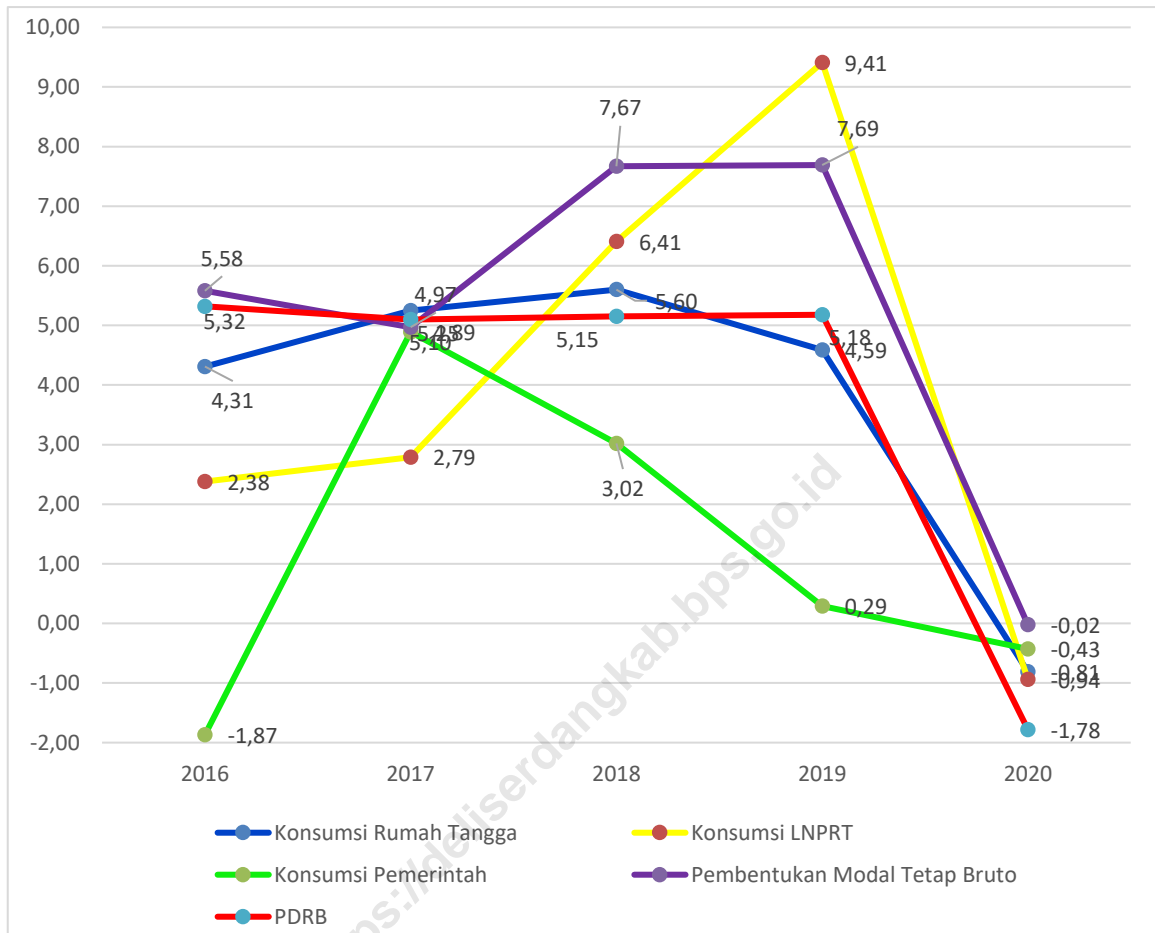
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,31	5,25	5,60	4,59	(0,81)
2. Konsumsi LNPRT	2,38	2,79	6,41	9,41	(0,94)
3. Konsumsi Pemerintah	(1,87)	4,89	3,02	0,29	(0,43)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,58	4,97	7,67	7,69	(0,02)
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,32	5,10	5,15	5,18	(1,78)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Grafik 3.5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 3.5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016 - 2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

⁶ Indeks perkembangan

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	150,89	157,55	162,41	169,66	171,37
2. Konsumsi LNPRT	128,46	133,84	137,08	139,31	142,02
3. Konsumsi Pemerintah	162,89	174,43	173,30	173,22	172,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,48	144,14	150,04	150,12	152,60
5. Perubahan Inventori	129,73	125,14	145,20	145,39	150,41
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	53,56	58,01	46,18	47,26	51,57
PDRB	137,70	143,39	147,88	152,11	156,02

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kontribusi konsumsi rumah tangga memiliki peran yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Deli Serdang. Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Deli Serdang sebesar (1,78) mengalami penurunan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dampak pandemi covid - 19 selama tahun 2020 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terlihat dari seluruh komponen mengalami penurunan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar adalah dari Komponen Perubahan Inventori yaitu sebesar 0,44 persen. sedangkan komponen lainnya hanya memberikan kontribusi pertumbuhan masing-masing di bawah 1 persen.

Tabel 3.6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,30	2,77	2,96	2,44	(0,43)
2. Konsumsi LNPRT	0,01	0,02	0,04	0,05	(0,01)
3. Konsumsi Pemerintah	(0,07)	0,17	0,10	0,01	(0,01)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,79	1,60	2,46	2,52	(0,01)
5. Perubahan Inventori	(0,68)	(0,17)	0,10	0,03	0,44
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	1,97	0,72	(0,51)	0,12	(1,77)
PDRB	5,32	5,10	5,15	5,18	(1,78)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

3. 2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Deli Serdang untuk periode 2016 – 2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Deli Serdang, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Deli Serdang maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016 - 2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) sedangkan secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	49.311,12	54.188,31	58.987,65	64.449,02	64.572,22
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	32.679,99	34.394,75	36.320,61	37.987,08	37.678,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,91	58,15	58,37	58,95	58,62
Rata-rata konsumsi per-Rumah tangga (Ribu Rp)					
a. ADHB	101.570,22	109.393,77	116.817,63	125.303,33	123.653,01
b. ADHK 2010	67.313,69	69.435,11	71.928,40	73.855,40	72.153,62
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	23.792,82	25.625,47	27.364,52	29.352,26	28.900,17
b. ADHK 2010	15.768,23	16.265,16	16.849,22	17.300,60	16.863,74
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	4,31	5,25	5,60	4,59	(0,81)
b. Perkapita	2,13	3,15	3,59	2,68	(2,53)
Jumlah rumah tangga	485.488	495.351	504.955	514.344	522.205
Jumlah penduduk (orang)	2.072.521	2.114.627	2.155.625	2.195.709	2.234.320

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Selama periode 2016 - 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuatif, yaitu 57,91 persen (2016); 58,15 persen (2017); 58,37 persen (2018); 58,95 persen (2019) dan 58,62 persen di tahun 2020. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 58,47 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 57,91 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, setiap rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang menghabiskan dana sekitar 101,57 juta rupiah setahun untuk memenuhi

kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 109,39 juta rupiah (2017); 116,82 juta rupiah (2018); 125,30 juta rupiah (2019) dan mencapai 123,65 juta rupiah di tahun 2020. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga pada tahun 2020 sebesar 72,15 juta rupiah turun dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 sebesar 73,85 juta rupiah.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Selama tahun 2016-2019 Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). tetapi di tahun 2020 Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Fluktuasi tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang 2016 – 2020⁷ (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	40,02	39,89	39,58	41,24	42,66
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,10	4,09	4,18	4,28	4,46
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,28	14,62	14,88	14,44	14,59
d. Kesehatan & Pendidikan	7,68	7,63	7,40	7,08	7,39
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	21,96	21,64	21,97	21,62	20,36
f. Hotel & Restoran	9,38	9,41	9,35	8,89	8,13
g. Lainnya	2,58	2,72	2,64	2,45	2,40
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Pada tahun 2016 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,31 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar; 5,25 persen (2017); 5,60 persen (2018); 4,59 persen (2019) dan di tahun 2020 mencapai (0,81) persen. Besarnya penurunan pertumbuhan Komponen ini di tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi covid-19. Situasi pandemi yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan perekonomian di berbagai sektor, menjadi penyebab berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal ini mengharuskan banyak rumah tangga mengurangi pengeluaran dan hidup berhemat. Sementara itu rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 2,13 persen (2016); 3,15 persen (2017); 3,59 persen (2018); 2,68 persen (2019) dan (2,53) persen di tahun 2020. Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk volume dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga tertinggi pada kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga, terjadi pada tahun 2016 sebesar 9,36 persen, dan juga kelompok makanan, minuman dan rokok di tahun 2016 sebesar 7,56 persen, sedangkan kelompok hotel dan restoran peningkatan harga terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,90 persen.

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020⁸ (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,56	4,49	2,17	6,97	0,46
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,74	3,07	3,88	4,99	5,13
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,36	7,13	6,59	5,33	0,55
d. Kesehatan & Pendidikan	7,41	4,40	2,10	2,21	4,91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,40	2,06	3,39	2,51	(1,02)
f. Hotel & Restoran	5,90	3,98	2,04	0,02	1,71
g. Lainnya	5,19	12,41	1,28	(0,26)	2,90
Total Konsumsi	6,57	4,41	3,08	4,47	1,01

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	453.23	485.38	529.02	588.18	594.01
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	352.82	362.66	385.92	422.22	418.25
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.53	0.52	0.52	0.54	0.54
Pertumbuhan (ADHK 2010)	2.38	2.79	6.41	9.41	(0.94)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan atas dasar harga berlaku. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT sebesar 453,23 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 485,38 miliar rupiah (2017), 529,02 miliar rupiah (2018); 588,18 miliar rupiah (2019) dan meningkat mencapai 594,01 miliar rupiah (2020). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut 2,38 persen (2016), 2,79 persen (2017), 6,41 persen (2018) , 9,41 persen (2019) dan (0,94) persen pada tahun 2020.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang

memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	3,453.98	3,879.70	3,971.08	3,980.84	3,942.81
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2,120.47	2,224.23	2,291.42	2,298.10	2,288.11
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4.06	4.16	3.93	3.64	3.58
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1 666,56	1 834,70	1 842,19	1 813,01	1 764,66
b. ADHK 2010	1 023,14	1 051,83	1 063,00	1 046,63	1 024,07
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	232 153,32	291 816,48	313 646,69	317 274,00	314 243,08
b. ADHK 2010	142 523,90	167 298,24	180 982,41	183 159,33	182 362,84
Pertumbuhan ⁹					
a. Total konsumsi pemerintah	(1,87)	4,89	3,02	0,29	(0,43)
b. Konsumsi perkapita	(3,92)	2,80	1,06	(1,54)	(2,16)
c. Konsumsi per-pegawai pemerintah	4,83	17,38	8,18	1,20	(0,44)
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹⁰	14 878	13 295	12 661	12 547	12 547
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	2 072 521	2 114 627	2 155 625	2 195 709	2.234.320

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan untuk harga berlaku dan harga konstan. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3,45 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 3,88 triliun rupiah (2017), 3,97 triliun rupiah (2018), 3,98 triliun

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

¹⁰ Tidak termasuk polisi, militer dan PNS Pusat

rupiah (2019) dan menurun menjadi 3,94 triliun rupiah di tahun 2020. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun dari 2,12 triliun rupiah (2016), di tahun 2017 meningkat menjadi 2,22 triliun rupiah, 2,29 triliun rupiah di tahun 2018 dan 2,30 triliun di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 2,29 triliun rupiah di tahun 2020.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan pada periode 2016 - 2020, dari 4,06 persen (tahun 2016) hingga mencapai 3,58 persen (tahun 2020). Meskipun sepanjang periode tersebut, terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,16 persen; dan menjadi proporsi tertinggi sepanjang periode 2016 - 2020. dan tahun 2020, merupakan proporsi terendah sepanjang periode tersebut.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 - 2019, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1,67 juta rupiah; 1,83 juta rupiah (2017), 1,84 juta rupiah (2018). Tetapi untuk tahun 2019 pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan menjadi 1,81 juta rupiah dan terus menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 1,76 Juta rupiah.

Perkembangan konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan masing-masing bertumbuh sebesar:

(3,92) persen (2016); 2,80 persen (2017); 1,06 persen (2018) dan kembali menurun di tahun 2019 yaitu (1,54) persen , terus menurun menjadi sebesar (2,16) persen di tahun 2020.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat hingga tahun 2018. Dimana pada tahun 2016 sebesar 232,15 juta rupiah; 291,82 juta rupiah (2017); 313,65 juta rupiah (2018) dan pada tahun 2019 menjadi 317,27 juta rupiah, kemudian menurun menjadi 314,24 juta rupiah di tahun 2020.

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 17,38 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), tidak sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang mengalami penurunan. Pada periode tahun 2016 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 14.878, pada tahun 2017 menjadi 13.295, tahun 2018 menjadi 12.661, tahun 2019 menjadi 12.547 orang hingga di tahun 2020 tetap sebanyak 12 547 orang.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada

¹¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016 - 2020 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tiap tahunnya adalah sebagai berikut: 5,58 persen (2016); 4,97 persen (2017); 7,67 persen (2018); 7,69 persen (2019); dan mengalami penurunan yang sangat besar menjadi (0,02) persen pada tahun 2020.

Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	27,689.03	30,037.38	33,665.18	36,270.89	36,862.78
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	19,851.90	20,839.36	22,436.78	24,161.12	24,156.37
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	32.52	32.23	33.31	33.17	33.47
Struktur PMTB ¹²					
a. Bangunan (Miliar Rp)	24.171,48	26.434,56	30.028,44	32.262,93	32.188,84
(%)	87,30	88,01	88,55	88,31	87,32
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	3.517,55	3.602,82	3.881,74	4.269,96	4.673,94
(%)	12,70	11,99	11,45	11,69	12,68
Total PMTB (Miliar Rp)	27.689,03	30.037,38	33.910,18	36.532,89	36.862,78
Pertumbuhan ¹³ (%)					
a. Bangunan	5,97	5,43	8,53	7,60	(1,09)
b. Non Bangunan (%)	3,22	2,19	2,23	8,27	7,11
Total Pertumbuhan PMTB (%)	5,58	4,97	7,67	7,69	(0,02)

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	994.34	826.47	1,052.50	1,084.48	1,598.81
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	766.46	660.45	724.87	745.93	1,063.00
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1.17	0.89	1.04	0.99	1.45

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen

inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2016 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 0,99 triliun rupiah kemudian turun pada 2017 sebesar 0,83 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 1,52 triliun rupiah, dan terus meningkat di tahun 2019 menjadi 1,08 triliun rupiah, hingga tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 1,60 triliun rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, proporsi perubahan inventori adalah 1,17 persen, 0,89 persen (2017), 1,04 persen (2018), 0,99 persen (2019) dan 1,45 persen di tahun 2020. Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2020 dengan porsi sebesar 1,45 persen.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Deli Serdang, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Transaksi Impor merupakan konsumsi masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang berasal dari wilayah lain. Sehingga net Ekspor dapat didefinisikan sebagai selisih antara ekspor dan Impor.

Tabel 3.14. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	3,250.31	3,776.65	2,854.79	2,960.74	2,574.61
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6,068.04	6,510.42	6,181.41	6,264.23	4,992.13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3.82	4.05	2.82	2.71	2.34
Pertumbuhan ¹⁴	23,56	7,29	(5,05)	1,34	(20,31)

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2016 - 2020 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2016 - 2017 nilai net ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 3,25 triliun rupiah pada tahun 2016, meningkat menjadi 3,78 triliun rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 nilai net ekspor barang dan jasa turun menjadi sebesar 2,85 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 2,96 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2020 kemabali menurun menjadi 2,57 triliun rupiah.

Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 6,07 triliun rupiah (2016), 6,51 triliun rupiah (2017), 6,18 triliun rupiah (2018), 6,27 triliun rupiah (2019) dan 4,99 triliun rupiah di tahun 2020. Sementara itu, pada periode 2016 - 2020, proporsi dalam PDRB mengalami fluktuasi dari 3,82 persen pada tahun 2016 menjadi 2,34 persen di tahun 2020.

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010


Pertumbuhan riil net ekspor barang dan jasa mencapai angka yang tinggi pada tahun 2016, dengan nilai mencapai 23,56 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 7,29 persen (2017), (5,05) persen (2018), 1,34 persen (2019) dan (20,31) persen pada tahun 2020.

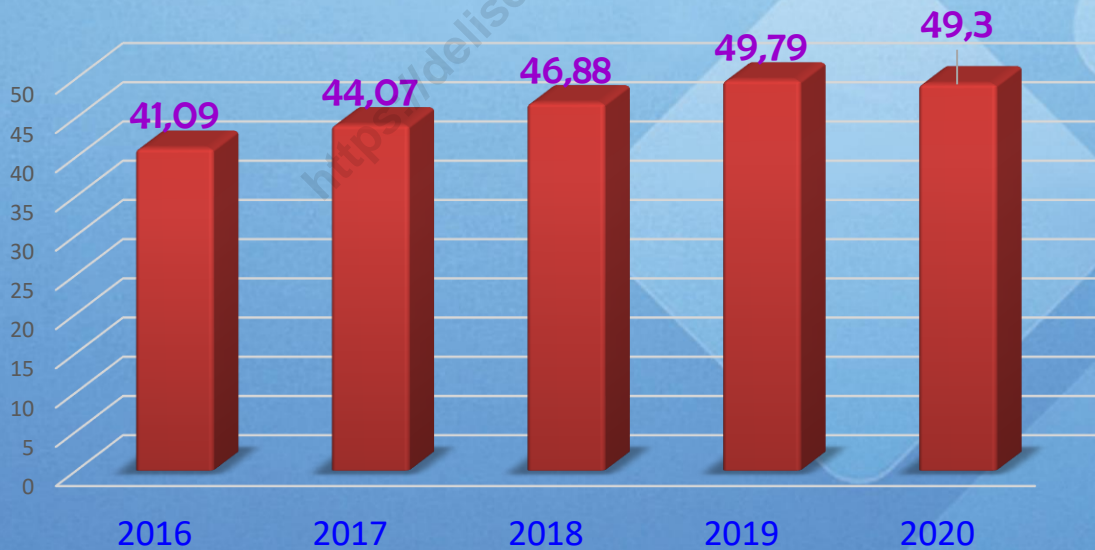
<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB 4

Perkembangan Agregat PDRB Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020



 **PDRB Perkapita ADHB menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)**



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Deli Serdang, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	85 152,02	93 193,89	101 060,21	109 334,14	110 145,24
- ADHK 2010	61 839,67	64 991,87	68 341,00	71 878,69	70 596,82
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	41.086,20	44.071,08	46.882,09	49.794,46	49.296,99
- ADHK 2010	29.837,90	30.734,44	31.703,57	32.735,98	31.596,56
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3,13	3,00	3,15	3,26	(3,48)
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	2.072.521	2.114.627	2.155.625	2.195.709	2.234.320

*)Angka sementara

**) Angka sangat sementara

PDRB per kapita Deli Serdang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Hingga pada tahun 2020 turun menjadi 49,30 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 49,79 juta rupiah. Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara riil mengalami perlambatan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3,00 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 3,15 persen dan tahun 2019 tumbuh sebesar 3,26 persen. Kemudian pada tahun 2020 menurun sangat tajam menjadi (3,38) persen. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi covid - 19 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian secara global

4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	49.311,12	54.188,31	58.987,65	64.449,02	64.572,22
b. LNPRT	453,23	485,38	529,02	588,18	594,01
c. Pemerintah	3.453,98	3.879,70	3.971,08	3.980,84	3.942,81
J u m l a h	53.218,33	58.553,39	63.487,75	69.018,04	69.109,04
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	85,152.02	93,193.89	101,060.21	109,334.14	110,145.24
Proporsi	62,50	62,83	62,82	63,13	62,74

*)Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 62 persen). Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, proporsi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 63,13 persen. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 62,50 persen.

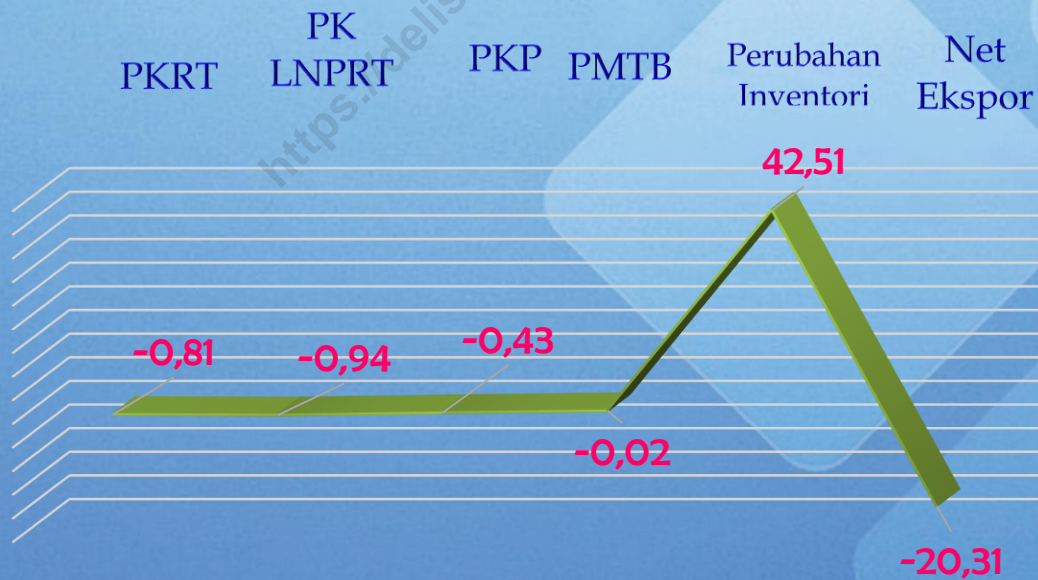
<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB 5

Penutup



**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
menurut Pengeluaran, 2020
(Persen)**



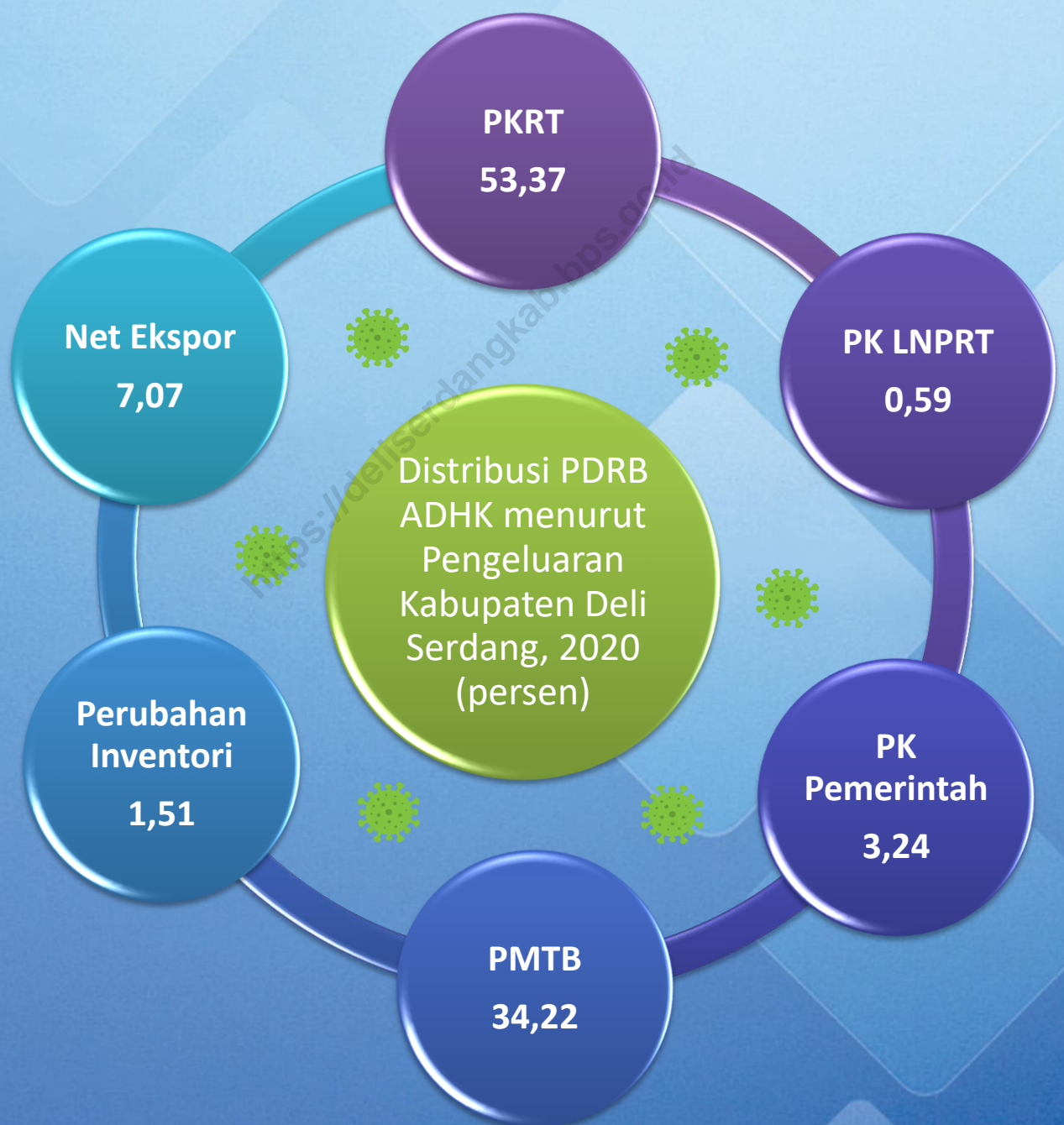
1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016 s.d 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016 s.d 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-

Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti net ekspor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Deli Serdang terhadap ekonomi luar daerah.

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (milyar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49 311,12	54 188,31	58 987,65	64 449,02	64 572,22
a. Makanan Minuman dan Rokok	19 735,63	21 615,91	23 347,54	26 578,14	27 548,05
b. Pakaian dan Alas Kaki	2 020,79	2 218,97	2 462,99	2 755,45	2 881,55
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7 042,00	7 923,83	8 775,08	9 309,45	9 421,50
d. Kesehatan dan Pendidikan	3 784,80	4 133,92	4 366,72	4 565,63	4 771,77
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10 830,44	11 724,35	12 957,14	13 933,27	13 145,81
f. Hotel dan Restoran	4 627,15	5 097,23	5 518,29	5 727,04	5 252,77
g. Lainnya	1 270,31	1 474,10	1 559,88	1 580,04	1 550,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	453,23	485,38	529,02	588,18	594,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3 453,98	3 879,70	3 971,08	3 980,84	3 942,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27 689,03	30 037,38	33 665,18	36 270,89	36 862,78
a. Bangunan	24 171,48	26 434,56	29 873,44	32 152,93	32 188,84
b. Non-Bangunan	3 517,55	3 602,82	3 791,74	4 117,96	4 673,94
5. Perubahan Inventori	994,34	826,47	1 052,50	1 084,48	1 598,81
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	3 250,31	3 776,65	2 854,79	2 960,74	2 574,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	85 152,02	93 193,89	101 060,21	109 334,14	110 145,24

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (milyar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32 679,99	34 394,75	36 320,61	37 987,08	37 678,98
a. Makanan Minuman dan Rokok	12 785,86	13 401,61	14 168,18	15 077,04	15 555,72
b. Pakaian dan Alas Kaki	1 455,23	1 550,36	1 656,62	1 765,27	1 755,91
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4 566,83	4 796,83	4 983,95	5 019,66	5 052,41
d. Kesehatan dan Pendidikan	2 659,65	2 782,58	2 878,94	2 945,06	2 933,99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7 253,42	7 693,81	8 224,19	8 627,12	8 223,50
f. Hotel dan Restoran	3 050,46	3 231,65	3 428,82	3 557,80	3 208,25
g. Lainnya	908,55	937,90	979,91	995,12	949,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	362,66	385,92	422,22	418,25	362,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 224,23	2 291,42	2 298,10	2 288,11	2 224,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20 839,36	22 436,78	24 163,82	24 156,37	20 839,36
a. Bangunan	17 065,68	17 992,13	19 526,05	21 009,59	20 780,66
b. Non-Bangunan	2 786,22	2 847,23	2 910,73	3 151,53	3 375,71
5. Perubahan Inventori	766,46	660,45	724,87	715,93	1 063,00
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	6 068,04	6 510,42	6 181,41	6 264,23	4 992,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	61 839,68	64 991,87	68 341,00	71 878,69	70 596,82

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,91	58,15	58,37	58,95	58,62
a. Makanan Minuman dan Rokok	23,18	23,24	23,10	24,31	25,01
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,37	2,38	2,44	2,52	2,62
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,27	8,50	8,68	8,51	8,55
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,44	4,44	4,32	4,18	4,33
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12,72	12,58	12,82	12,74	11,93
f. Hotel dan Restoran	5,43	5,47	5,46	5,24	4,77
g. Lainnya	1,49	1,58	1,54	1,45	1,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,53	0,52	0,52	0,54	0,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,06	4,16	3,93	3,64	3,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,52	32,23	33,31	33,17	33,47
a. Bangunan	28,39	28,37	29,56	29,41	29,22
b. Non-Bangunan	4,13	3,87	3,75	3,77	4,24
5. Perubahan Inventori	1,17	0,89	1,04	0,99	1,45
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	3,82	4,05	2,52	2,71	2,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,85	52,92	53,15	52,85	53,37
a. Makanan Minuman dan Rokok	20,68	20,62	20,73	20,98	22,03
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,35	2,39	2,42	2,46	2,49
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,38	7,38	7,29	6,98	7,16
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,30	4,28	4,21	4,10	4,16
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,73	11,84	12,03	12,00	11,65
f. Hotel dan Restoran	4,93	4,97	5,02	4,95	4,54
g. Lainnya	1,47	1,44	1,43	1,38	1,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,57	0,56	0,56	0,59	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,43	3,42	3,35	3,20	3,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,10	32,06	32,83	33,61	34,22
a. Bangunan	27,60	27,68	28,57	29,23	29,44
b. Non-Bangunan	4,51	4,38	4,26	4,38	4,78
5. Perubahan Inventori	1,24	1,02	1,06	1,04	1,51
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	9,81	10,02	9,04	8,72	7,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11,16	9,89	8,99	8,26	0,19
a. Makanan Minuman dan Rokok	11,99	9,53	8,01	13,84	3,65
b. Pakaian dan Alas Kaki	11,88	9,81	11,00	11,87	4,58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,61	12,52	10,74	6,09	1,20
d. Kesehatan dan Pendidikan	11,80	9,22	5,63	4,56	4,51
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,48	8,25	10,51	7,53	(5,65)
f. Hotel dan Restoran	12,21	10,16	8,26	3,78	(8,28)
g. Lainnya	9,27	16,04	5,82	1,29	(1,85)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,85	7,09	8,99	11,18	0,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,51	12,33	2,36	0,25	(0,96)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,08	8,48	12,08	7,74	1,63
a. Bangunan	10,87	9,36	13,01	7,63	0,11
b. Non-Bangunan	4,98	2,42	5,24	8,60	13,50
5. Perubahan Inventori	(34,63)	(16,88)	27,35	3,04	47,43
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	56,29	16,19	(24,41)	3,71	(13,04)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10,97	9,44	8,44	8,19	0,74

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,31	5,25	5,60	4,59	(0,81)
a. Makanan Minuman dan Rokok	4,12	4,82	5,72	6,41	3,17
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,80	6,54	6,85	6,56	(0,53)
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,14	5,04	3,90	0,72	0,65
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,09	4,62	3,46	2,30	(0,38)
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,88	6,07	6,89	4,90	(4,68)
f. Hotel dan Restoran	5,96	5,94	6,10	3,76	(9,82)
g. Lainnya	3,89	3,23	4,48	1,55	(4,61)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,38	2,79	6,41	9,41	(0,94)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(1,87)	4,89	3,02	0,29	(0,43)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,58	4,97	7,67	7,69	(0,02)
a. Bangunan	5,97	5,43	8,53	7,60	(1,09)
b. Non-Bangunan	3,22	2,19	2,23	8,27	7,11
5. Perubahan Inventori	(34,15)	(13,83)	9,75	2,91	42,51
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	23,56	7,29	(5,05)	1,34	(20,31)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,32	5,10	5,15	5,18	(1,78)

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	190,76	209,63	228,20	249,33	249,80
a. Makanan Minuman dan Rokok	191,19	209,40	226,18	257,47	266,87
b. Pakaian dan Alas Kaki	183,34	201,32	223,46	249,99	261,43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	181,69	204,44	226,40	240,19	243,08
d. Kesehatan dan Pendidikan	178,00	194,42	205,37	214,73	224,42
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	194,36	210,41	232,53	250,05	235,92
f. Hotel dan Restoran	214,49	236,28	255,79	265,47	243,49
g. Lainnya	183,40	212,82	225,20	228,11	223,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	154,75	165,73	180,63	200,83	202,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	186,10	209,04	213,96	214,49	212,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	199,41	216,32	242,44	261,21	265,47
a. Bangunan	198,67	217,27	245,53	264,27	264,56
b. Non-Bangunan	204,64	209,60	220,59	239,57	271,92
5. Perubahan Inventori	121,43	100,93	128,53	132,43	195,24
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	963,66	1 119,70	846,39	877,80	763,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	197,84	216,53	234,81	254,03	255,91

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	126,43	133,06	140,51	146,96	145,76
a. Makanan Minuman dan Rokok	123,86	129,83	137,25	146,06	150,69
b. Pakaian dan Alas Kaki	132,03	140,66	150,30	160,15	159,31
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	117,83	123,76	128,59	129,51	130,35
d. Kesehatan dan Pendidikan	125,09	130,87	135,40	138,51	137,99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	130,17	138,07	147,59	154,82	147,58
f. Hotel dan Restoran	141,40	149,80	158,94	164,92	148,72
g. Lainnya	131,17	135,41	141,47	143,67	137,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	120,47	123,83	131,77	144,17	142,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	114,25	119,84	123,46	123,82	123,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	142,97	150,08	161,58	174,00	173,97
a. Bangunan	140,26	147,88	160,49	172,68	170,80
b. Non-Bangunan	162,09	165,64	169,34	183,35	196,39
5. Perubahan Inventori	93,60	80,65	88,52	91,09	129,81
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	1.799,06	1.930,22	1.832,67	1.857,23	1.480,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	143,68	151,00	158,78	167,00	164,03

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2010=100 Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 - 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	150,89	157,55	162,41	169,66	171,37
a. Makanan Minuman dan Rokok	154,36	161,29	164,79	176,28	177,09
b. Pakaian dan Alas Kaki	138,86	143,13	148,68	156,09	164,11
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	154,20	165,19	176,07	185,46	186,48
d. Kesehatan dan Pendidikan	142,30	148,56	151,68	155,03	162,64
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	149,32	152,39	157,55	161,51	159,86
f. Hotel dan Restoran	151,69	157,73	160,94	160,97	163,73
g. Lainnya	139,82	157,17	159,19	158,78	163,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	128,46	133,84	137,08	139,31	142,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	162,89	174,43	173,30	173,22	172,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,48	144,14	150,04	150,12	152,60
a. Bangunan	141,64	146,92	152,99	153,04	154,90
b. Non-Bangunan	126,25	126,54	130,27	130,67	138,46
5. Perubahan Inventori	129,73	125,14	145,20	145,39	150,41
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	53,56	58,01	46,18	47,26	51,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	137,70	143,39	147,88	152,11	156,02

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2010=100 Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang, 2016 – 2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,57	4,41	3,08	4,47	1,01
a. Makanan Minuman dan Rokok	7,56	4,49	2,17	6,97	0,46
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,74	3,07	3,88	4,99	5,13
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,36	7,13	6,59	5,33	0,55
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,41	4,40	2,10	2,21	4,91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,40	2,06	3,39	2,51	(1,02)
f. Hotel dan Restoran	5,90	3,98	2,04	0,02	1,71
g. Lainnya	5,19	12,41	1,28	(0,26)	2,90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,27	4,19	2,42	1,62	1,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,56	7,09	(0,65)	(0,05)	(0,52)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,27	3,34	4,10	0,05	1,65
a. Bangunan	4,62	3,73	4,13	0,03	1,21
b. Non-Bangunan	1,71	0,23	2,95	0,31	5,96
5. Perubahan Inventori	(0,73)	(3,54)	16,03	0,13	3,45
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	26,49	8,30	(20,39)	2,34	9,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,36	4,14	3,13	2,86	2,57

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang
Jl. Karya Utama Kompleks Pemkab Deli Serdang
Lubuk Pakam 20514
Telp : (061) 9755111, Fax : (061) 7951326
Email : bps1212@bps.go.id